

Judul : DPR Dorong Kerja Sama Lintas Sektor
Tanggal : Kamis, 13 September 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

DPR Dorong Kerja Sama Lintas Sektor

BADUNG—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong parlemen dunia meningkatkan kerja sama lintas sektor serta melakukan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur, dan kemitraan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke energi berkelanjutan.

Akses ke energi bersih, aman dan terjangkau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam agenda *The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD) di Badung, Bali, kemarin. Dia juga mengatakan ketersediaan energi seperti listrik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menjadi kebutuhan mutlak menunjang pembangunan.

"Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita mengingat ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan sumber energi terbarukan masih sangat terbatas," ucapnya dalam keterangan tertulis.

WPFSD merupakan wadah pertemuan Parlemen Dunia yang digagas DPR sejak 2017. Forum ini secara khusus digelar untuk meningkatkan peran Parlemen Dunia dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pada pertemuan pertama 2017, forum ini berhasil merumuskan pembangunan yang inklusif dan merata sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan.

WPFSD yang diselenggarakan pada 12-13 September 2018 diikuti sekitar 45 negara, antara lain Argentina, Bahrain, Bolivia, Iran, Irak, Yordania, Palestina, Peru, Serbia, Uni Emirat Arab, Venezuela, Kiribati, Kepulauan Solomon, Tonga, Armenia, Botswana, Mesir, Ghana, Madagaskar, Mikronesia, Mo-

ngolia, Maroko, Timor Leste serta Turki. Pertemuan WPFSD ini membahas topik "Menuju Energi Berkelanjutan untuk Semua".

Menurutnya, penetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement* mengenai perubahan iklim pada 2015 lalu, telah mengidentifikasi energi sebagai salah satu sektor utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan tahun 2030 sebagai target waktu untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua.

Bamsot juga mengatakan, permintaan energi semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus berkembang. Kebutuhan terhadap energi fosil, terutama minyak bumi menimbulkan kekhawatiran mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan. "Potensi energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya, sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas," jelasnya.

Dia menilai pemanfaatan energi terbarukan yang masih terbatas disebabkan banyak faktor, antara lain harga yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan energi fosil, penguasaan teknologi yang rendah sehingga nilai impiornya tinggi, keterbatasan dana un-



Ketua DPR Bambang Soesatyo (dua kiri) didampingi (dari kiri ke kanan) Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Utut Adianto, dan Agus Hermanto berbincang saat pembukaan *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPFSD) di Badung, Bali, kemarin.

tuk penelitian, pengembangan, maupun investasi, serta infrastruktur yang kurang memadai.

"Pembangunan berkelanjutan di bidang energi, dalam proses produksi dan penggunaannya, mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terlibat sehingga bisa melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia," ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sambungnya, Indonesia sudah memulai mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa di antaranya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 626 unit, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 69 unit, dan pembangkit listrik mini hidro (PLTM) 2 unit. Yang terbaru, Jokowi telah meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 75 MW yang berlokasi di Sidrap.

Dia menyadari akan banyak tantangan berupa pembiayaan,

sarana pelaksanaan, dan inovasi dalam menciptakan kerja sama global maupun regional untuk pengembangan energi terbarukan. "Karena itulah kita berkumpul di sini untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman serta mencari solusi terbaik," katanya.

Begitupun dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, sektor energi panas bumi atau geotermal di Indonesia harus dikuatkan.

"Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan ini harus dikuatkan. Presiden Jokowi

juga sudah menandatangani *Paris Agreement* yang di dalamnya mengharuskan kita untuk ikut menjaga lingkungan dunia, yakni dengan menggunakan energi ramah lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat masalah energi baru terbarukan ini," ucapnya.

Menurut Agus, energi geotermal memiliki *resources* cukup tinggi. Begitu juga dengan energi angin yang sudah berjalan pembangunannya, yaitu di wilayah Jeneponto dan Sidrap, Sulawesi Selatan, yang potensinya juga sangat bagus. "Sehingga

kita harus menguatkan energi ramah lingkungan, yang dalam hal ini adalah energi geotermal, energi angin, dan juga energi surya," jelasnya.

Menurutnya, saat ini merupakan momen yang baik dalam upaya memperkuat masalah energi baru terbarukan. "Harini adalah waktu yang sangat tepat, di mana kita akan memperkuat sektor energi baru terbarukan. Mudah-mudahan ini dapat mencapai hasil yang maksimal seperti apa yang diinginkan oleh kita dan oleh dunia," tegasnya.

● **mula akmal**